

RELASI EKONOMI DAN PENDIDIKAN

Oleh :

Zainal Arifin

staiqod_zainal@yahoo.com

ABSTRAK

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Adapun pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga jumlahnya, sedang pertimbangan ekonomis itu sendiri didasarkan pada kemampuan anggaran dan manajemennya. Tulisan ini diangkat guna mengkaji peranan ekonomi sebagai landasan pendidikan untuk menunjang keberhasilan, keberlangsungan dan perkembangan lembaga pendidikan. Simpulan dari tulisan ini menemukan bahwa adanya peran yang signifikan antara ekonomi dengan pendidikan, dan permasalahan yang muncul adalah minimnya sumber dana yang masuk serta ditambah kurang mampunya lembaga pendidikan untuk memajemen sumber daya yang ada dengan efektif dan efesien.

Kata kunci: Landasan Ekonomi, Pendidikan

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis. guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan.

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan menaikkan dana pendidikan sebesar 20% APBN. Pernyataan di atas sesuai dengan pemberitaan di salah satu media yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 368,899 triliun atau 20 persen dari total anggaran belanja negara.

Pemenuhan dana pendidikan sebesar 20% sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen merupakan cerminan keinginan segenap bangsa Indonesia untuk memiliki pendidikan yang lebih merata dan berkualitas/bermutu. Pencapaian pendidikan nasional yang lebih merata dan bermutu ini lebih jauh dinyatakan dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 3 dan 4: Pasal3: "Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu".

Pasal 4: "Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat". Undang-undang 1945 dan PP No. 19 /2005 tersebut memberikan isyarat bahwa pemenuhan anggaran pendidikan yang memadai harus diorientasikan pada perwujudan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Permasalahan pemenuhan anggaran 20% ini telah menjadi polemik yang cukup besar, baik di pemerintahan maupun masyarakat. Diantaranya karena alasan ketidakmampuan Negara untuk membiayai pendidikan dengan porsi 20% sekaligus dari APBN.

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan ini bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah I dan II (propinsi dan kab/kota). Kondisi ini sebagaimana ditegaskan dalam PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat". Implementasi perundang-undangan yang dimaksud memerlukan tekad yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah. Penganggaran dana sebesar 20% dari APBN yang telah dicanangkan pemerintah ternyata belum memberikan dampak positif yang signifikan. Masih terjadi beberapa permasalahan yang timbul di lapangan. Salah satu masalah yang timbul adalah penyelewengan dana pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dana pendidikan tidak dikelola dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

Pada tahun 2014, sektor pendidikan mendapat alokasi dana sebesar Rp 368 triliun. Sebagian besar atau Rp 268 triliun, ditransfer ke daerah melalui berbagai alokasi seperti dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Misalnya untuk tunjangan profesi guru. Di salah satu kabupaten di Jawa Barat, dalam satu kuartal, nilai yang tidak tepat sekitar Rp 1,3 miliar. Modus yang dilakukan dengan menyiapkan administrasi bagi guru yang tidak berhak mendapat tunjangan. Kemudian, ada yang menghimpun dana dari mereka yang akan menerima tunjangan. Selain itu, juga termasuk bantuan siswa miskin di Kementerian Agama. Terjadinya penyimpangan yang meliputi administrasi yang lemah, asal-asalan, serta tidak didukung data yang andal (<http://www.harianterbit.com/>, diakses 5 Oktober 2015).

Masalah yang kedua adalah kurang meratanya pendidikan di Indonesia. Hal ini didukung dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, sehingga ada kesenjangan yang signifikan antara pendidikan yang berada di kota dengan pendidikan yang berada di desa-desa, apalagi di pulau-pulau yang terpencil, yang nota bene akses informasi dan transportasi sangat sulit. Seperti halnya di Jakarta, yang merupakan ibu kota Negara, disana dapat dengan mudah menemukan sekolah seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dengan berbagai macam fasilitas lengkap yang ditawarkan. Tetapi fasilitas pendidikan di Jakarta seperti itu belum tentu kita temukan di luar kota Jakarta, seperti pedalaman pulau sumatera, Kalimantan, Sulawesi, papua, daerah-daerah terpencil lain di Indonesia bahkan di pulau jawa itu sendiri.

Kehidupan di daerah pedalaman berbanding terbalik dengan kehidupan di kota. Sangat ironis melihat anak-anak di daerah pedalaman Indonesia yang masih jauh tertinggal tentang pendidikan. Padahal Indonesia sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Tidak maksimalnya pengelolaan anggaran tersebut mengakibatkan anak-anak di pedalaman banyak yang buta huruf, tidak bisa berhitung dan belum bisa menggunakan

teknologi-teknologi yang ada. Sekolah mereka masih banyak yang rusak dan tidak layak untuk dipakai (<http://regional.kompasiana.com/>, diakses 5 Oktober 2015).

Ilustrasi di atas menggambarkan pentingnya hubungan antara ekonomi dan pendidikan, yang mana ekonomi pada dasarnya merupakan salah satu penopang dari keberhasilan proses pendidikan. Tanpa kemampuan ekonomi maka akan sulit seseorang mendapatkan layanan pendidikan unggul dan berkualitas. Jadi pada intinya dapat ditarik benang merah bahwa ekonomi merupakan daya dukung utama keberhasilan proses pendidikan. Makalah ini akan mencoba mendeskripsikan bagaimanakah peran ekonomi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan.

B. HUBUNGAN EKONOMI DAN PENDIDIKAN

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos) yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja (<http://id.wikipedia.org/>, diakses 25 September 2014).

Pokok persoalan yang dianalisa dalam ilmu ekonomi adalah :

1. Bagaimanakah caranya menggunakan pendapatan atau sumber-sumber daya tertentu agar ia dapat memberikan kepuasan maksimum kepada seseorang atau sesuatu masyarakat.
2. Bagaimana cara meminimumkan penggunaan pendapatan atau sumber-sumber daya untuk mencapai suatu tingkat kepuasan tertentu.

Dalam hubungannya antara biaya dan manfaat, pendidikan dipandang sebagai salah satu bentuk investasi pertama kali, hal ini dikemukakan oleh Theodore W Schultz pada tahun 1960 yang berjudul *investment in human capital dalam forum American Economic Assosiation*. Pesan yang disampaikan adalah “proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan suatu investasi”. Teori human capital suatu aliran pengeluaran yang menganggap manusia merupakan suatu bentuk kapital sebagai mana bentuk-bentuk kapital lainnya seperti mesin, teknologi, uang, tanah, materil yang menentukan pertumbuhan produktivitas melalui investasi dirinya sendiri. Human capital dapat diaplikasikan melalui berbagai bentuk investasi SDM diantaranya pendidikan formal, pendidikan informal, pengalaman kerja, kesehatan, gizi dan transmigrasi.

Konsep investasi SDM menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori human capital tenaga kerja merupakan

pemegang kapital yang tercermin dalam pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas kerjanya. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun didalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber- sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendistribusikannya secara merata dan adil diantara berbagai kelompok masyarakat. Cohn, 1979 (dalam Fatah, 2002) menyatakan ekonomi pendidikan adalah studi tentang bagaimana manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber daya yang langka/terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, pendapat, sikap, dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta mendiskusikannya secara merata dan adil diantara berbagai kelompok masyarakat.

Ilmu ekonomi pendidikan berkembang menjadi perspektif investasi sumber daya manusia. Investasi ini menganggap ada kaitan antara pendidikan, produktivitas kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga jumlahnya. Pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran, sedangkan pertimbangan politis didasarkan pada tujuan masyarakat secara menyeluruh.

Di negara sedang berkembang seperti Indonesia skala prioritas tertinggi adalah pertumbuhan ekonomi dan keadilan. Investasi sebagai suatu konsep umum dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah barang atau jasa di kemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang (Cohn, 1979, dalam Fattah 2002) investasi dalam SDM dapat diartikan sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang dikemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap. Rich (1992) mengakui bahwa seseorang memiliki potensi keuangan yang berhubungan dengan kualitas pengetahuan yang diperolehnya. Rich (1992) menyatakan manfaat pendidikan juga dapat dilihat sebagai nilai tambah yang diperoleh seseorang karena mendapat pendidikan tertentu. Nilai tambah secara umum merupakan peningkatan derajat, harkat, dan martabat seseorang. Secara khusus dipandang sebagai peningkatan kemampuan berpikir, bersikap dan berperilaku, dan keterampilan.

Sedangkan manfaat ekonomi dari pendidikan merupakan nilai tambah secara ekonomi karena bertambahnya tingkat pendidikan. Manfaat dibagai menjadi manfaat pribadi dan manfaat masyarakat. Manfaat bagi pribadi adalah tambahan penghasilan bersih (setelah pajak) seumur hidup dari tenaga kerja karena bertambahnya tingkat pendidikan tenaga kerja tersebut. Manfaat bagi masyarakat adalah tambahan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja bagi masyarakat karena meningkatnya pendidikan tenaga kerja tersebut (Sumarno, 2005).

Investasi Sumber Daya Manusia menurut Todaro (2000) menyatakan bahwa peran pendidikan formal tidaklah terbatas memberikan pengetahuan dan keahlian kepada masing-masing individu untuk dapat bekerja sebagai agen perubahan ekonomi yang baik bagi

masyarakatnya, tetapi juga menanamkan tata nilai luhur, norma-norma, cita-cita, tingkah laku, dan aspirasi yang saling berkaitan baik langsung maupun tidak langsung. Pendidikan juga diharapkan mendapatkan tenaga tenaga kerja terdidik dalam berbagai tingkatan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan bangsa.

C. PERAN EKONOMI DALAM PENDIDIKAN

Faktor ekonomi adalah salah satu sisi yang tidak akan bisa dipisahkan dalam pendidikan itu sendiri, karena ekonomi sangat berperan penting dalam menunjang berbagai pendidikan. Fungsi dari pendidikan itu sendiri yaitu untuk menyiapkan peserta didik, maksud dari menyiapkan peserta didik disini dapat diartikan bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu disiapkan dan sedang menyiapkan dirinya sendiri. Adapun strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan. Maksud dari bimbingan disini adalah pemberian bantuan, arahan, motivasi dan nasihat, agar siswa mampu mengatasi dan memecahkan masalah serta menanggulangi kesulitannya sendiri.

Menurut Pidarta (2007) perkembangan ekonomi secara makro yang berpengaruh dalam bidang pendidikan, antara lain:

1. Banyaknya orang kaya yang mau secara sukarela menjadi orang tua asuh/bapak angkat (dorongan hati atau himbauan pemerintah) untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun.
2. Terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan yaitu kerja sama antara sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa, dalam rangka mengembangkan keterampilan siswa.
3. Munculnya sekolah-sekolah unggul yang memiliki sarana dan prasarana, penggajian guru, program yang beragam, proses belajar lebih baik.

Menurut Pidarta (2007) perkembangan ekonomi secara mikro adalah peningkatan taraf hidup manusia yang selalu dikaitkan dengan perekonomian, antara lain:

1. Ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang walaupun orang itu sudah menyadari bahwa kehidupan yang gemerlapan tidak menjamin memberi kebahagiaan.
2. Berhubungan dengan tingkat kehidupan keluarga, tingkat kehidupan sekolah atau perguruan tinggi pun sangat ditentukan oleh kondisi ekonominya masing-masing.

Sekolah atau perguruan tinggi yang kaya akan bisa hidup lebih leluasa, karena semua jenis pembiayaan dapat diberikan dana sebagaimana mestinya. Malah ada sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki dana lebih dan disimpan di bank agar mendapat bunga sebagai dana tambahan. Sebaliknya ada sekolah atau perguruan tinggi yang miskin dan sangat sulit bergerak, menggaji guru atau dosen saja masih sulit apalagi membuat gedung atau membeli perlengkapan belajar yang canggih.

Lembaga pendidikan di Indonesia sebagian besar masih lemah ekonominya, walaupun sudah memiliki gedung, sementara itu orang-orang kaya lebih memilih mendirikan sekolah

sendiri (sekolah unggulan) daripada memberikan uang kepada sekolah yang ada dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

D. FUNGSI PRODUKSI DALAM PENDIDIKAN

Thomas (dalam Pidarta, 2007) membagi fungsi produksi dalam pendidikan menjadi 3 macam:

1. Fungsi produksi administrator
2. Fungsi produksi psikologi
3. Fungsi produksi ekonomi.

Fungsi yang pertama adalah produksi administrator. Pada fungsi ini yang dimaksud input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan yang dapat di hitung dan di nilai harganya dalam bentuk uang, antara lain: prasarana dan sarana belajar, termasuk kelas; perlengkapan belajar, media dan alat peraga baik di kelas maupun di laboratorium; buku-buku dan bentuk material seperti film, flash disk/hard disk; barang-barang habis pakai seperti zat-zat kimia laboratorium, ATK dll; dan waktu guru/dosen dan personalia yang dipakai memproses peserta didik. Sementara output dalam fungsi produksi adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik. Layanan-layanan ini dihitung lewat sistem kredit semester atau SKS dan lama waktu belajar peserta didik. Lembaga pendidikan yang baik akan memungkinkan harga input sama atau lebih kecil daripada harga output. Biaya input akan dibayar oleh lembaga, sedangkan biaya output akan dibayar oleh peserta didik.

Fungsi yang kedua adalah produksi psikologi. Inputnya sama dengan fungsi produksi administrator, akan tetapi outputnya berbeda. Output fungsi produksi psikologi adalah semua hasil belajar siswa yang mencakup: peningkatan kepribadian; pengarahan dan pembentukan sikap; penguatan kemauan; peningkatan estetika; penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi; dan penajaman pikiran dan peningkatan ketrampilan. Namun output fungsi ini tidaklah mudah, karena tidak mudah mengkuantifikasi dan menguangkan aspek-aspek psikologi, dan harganya hanya bisa di cari lewat kegunaannya di masyarakat serta kecocokannya dengan norma dan kondisi masyarakat. Selain itu karena tidak adanya variabel kontrol terhadap proses belajar mengajar di lembaga pendidikan.

Adapun fungsi produksi ekonomi memiliki input sebagai berikut: semua biaya pendidikan seperti pada input produksi administrator; semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan seperti uang saku, transportasi, membeli buku, ATK, selama belajar atau kuliah; dan opportunity cost. Outputnya adalah tambahan penghasilan peserta didik apabila telah tamat dan bekerja. Fungsi produksi ekonomi ini bertalian erat dengan marketing. Marketing adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang memberikan perubahan nilai dengan target pasar sebagai tujuan lembaga pendidikan yang mencakup: (1) mendesain penawaran; (2) menentukan kebutuhan atau keinginan pasar dalam hal ini peserta didik sesuai dengan kebijakan link and match; dan (3) menentukan harga efektif dengan mengadakan komunikasi, distribusi, komunikasi, dan layanan. Dalam hal ini keuntungan marketing adalah: (1) meningkatnya misi pendidikan secara sukses dan terselenggara dengan baik, sebab diisi dengan program yang baik; (2) meningkatkan daya tarik

terhadap petugas, peserta didik, dana donator; (3) meningkatkan kepuasan masyarakat; dan (4) meningkatkan keefesiensi dan kegiatan pemasaran. Akan tetapi dalam marketing juga terdapat kelemahan yaitu (1) lembaga pendidikan selalu dijadikan usaha dagang, dikomersilkan dalam mendapatkan keuntungan; dan (2) idealisme pendidikan cenderung diabaikan dalam dunia pendidikan di Negara kita.

Mutrofin, 1996 (dalam Pidarta, 2007) menyatakan bahwa negara-negara maju hubungannya antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi sangatlah jelas, di mana sistem pendidikan diorientasikan kepada kebutuhan ekonomi yang didasari pada teknologi tinggi, fleksibilitas dan mobilitas angkatan kerja. Dalam masa pembangunan dinegara kita sekarang ini pengembangan ekonomi mendapat tempat strategis, dengan munculnya link and match, kebijaksanaan ini meminta dunia pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang sesuai dengan pasaran kerja, mencaku mutu, dan jumlah serta jenisnya.

E. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS DANA PENDIDIKAN

Menurut Pidarta (2007) efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah apabila dengan dana tersebut tujuan pendidikan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan relatif sempurna. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi penggunaan dana pendidikan karena dana pendidikan yang relatif terbatas dan departemen pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana.

Terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat efisiensi pendidikan. Faktor-faktor tersebut tersebut adalah:

1. Penggunaan uang yang sudah dialokasikan untuk masing-masing kegiatan.
2. Proses pada setiap kegiatan. Hal ini bisa dilihat langsung seperti dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan bisa juga diperiksa dan hasil laporannya seperti pada bidang penelitian.
3. Hasil masing-masing kegiatan. (Pidarta, 2007)

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pendidikan, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Dalam penyusunan anggaran belanja, khususnya di perguruan tinggi, pemerintah menyusun pedoman yang memakai kode-kode tertentu untuk memudahkan pengecekan.
2. Penyesuaian jumlah fakultas dengan kebutuhan pembangunan.
3. Menutup jurusan-jurusan yang lulusannya sudah dipandang terlalu banyak dan tidak dapat mencari pekerjaan atau tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
4. Tidak mengangkat pegawai negeri baru, termasuk guru dan dosen, kecuali sebagai pengganti mereka yang pensiun atau meninggal.

F. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN EKONOMI DI SEKOLAH

Ekonomi sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum bisa dikatakan menjadi landasan yang kuat. Berbagai masalah ekonomi timbul dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Salah satu masalah yang serius adalah adanya tindak penyelewengan dana BOS oleh pihak- pihak terkait yang tidak bertanggung jawab. Laporan dari Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) bersama jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas orang tua siswa tentang pengelolaan dana BOS oleh sekolah pada tahun 2013 sangat mencengangkan. Laporan tersebut menyatakan bahwa 87 persen sekolah tak transparan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jumlah tersebut merupakan hasil uji akses yang dilakukan terhadap 222 sekolah sample di delapan provinsi. Dari 222 sekolah yang menjadi sample, 87 persen di antaranya menolak memberikan informasi soal pengelolaan dana BOS (<http://merdeka.com/>, diakses 5 Oktober 2015).

Kasus penyelewengan dana BOS salah satunya terjadi di SDN Mustikajaya 1 Agus Supriyatna. Kepala SDN Mustikajaya 1, diperiksa Inspektorat Kota Bekasi untuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah hingga Rp 700.000000,00 lebih. Laporan awalnya hanya Rp 73.000.000,00. Setelah auditor turun, ternyata Kepala SDN Mustikajaya 1 tersebut masih belum bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dananya senilai Rp 700.000.000,00 lebih (<http://wartakota.tribunnews.com/>, diakses 5 Oktober 2015).

Berbagai masalah yang timbul tersebut mendorong Kemdikbud untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan sekolah melalui ALPEKA. Kemdikbud bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID), mengembangkan perangkat lunak aplikasi pengelolaan dan pelaporan keuangan sekolah (ALPEKA) melalui program *Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teacher, Administrators, and Students* (PRIORITAS). Kegunaan perangkat ini untuk memudahkan sekolah dalam pembuatan pelaporan penggunaan dana BOS. Sehingga, pihak sekolah dapat lebih mudah untuk melakukan pengadministrasian, pelaporan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS (<http://www.kemdikbud.go.id/>, diakses 5 Oktober 2015).

G. IMPLIKASI LANDASAN EKONOMI PADA KONSEP PENDIDIKAN

Menurut Pidarta (2007) konsep-konsep pendidikan yang mungkin dikembangkan dari pembahasan mengenai landasan ekonomi ini adalah bertalian dengan hal-hal berikut::

1. Dalam dunia pendidikan, faktor ekonomi bukanlah sebagai pemegang peran yang utama, melainkan sebagai pemeran yang cukup menentukan keberhasilan pendidikan. Sebab dengan ekonomi yang memadai, maka: (a) prasarana, sarana, media, alat belajar, dan sebagainya bisa dipenuhi; (b) proses belajar mengajar bisa dilaksanakan secara lebih intensif, sebab para pendidik lebih dapat memusatkan perhatiannya, mereka tidak mencari sambilan di luar; dan (c) motivasi dan

- kegairahan kerja personalia pendidikan meningkat, mereka siap pula untuk meningkatkan profesi.
2. Faktor yang paling menentukan kehidupan dan kemajuan pendidikan adalah dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola dan guru-guru atau dosen- dosen lembaga pendidikan itu.
 3. Fungsi ekonomi pendidikan adalah (a) untuk menunjang kelancaran proses pendidikan dan (b) sebagai bahan pelajaran untuk membentuk manusia ekonomi. Bahan ini disisipkan pada pembahasan semua bidang studi.
 4. Manusia ekonomi yang dimaksud adalah manusia yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki kemampuan dan kebiasaan seperti (a) memiliki etos kerja; (b) biasa bekerja dengan sempurna, tidak setengah-setengah; (c) bersifat produktif; (d) biasa hidup hemat, tidak bermewah-mewah; dan (e) biasa hidup efisien.
 5. Dalam upaya membentuk SDM yang produktif, maka: (a) sistem pendidikan, struktur, kurikulum, dan jumlah serta jenis penelitian diatur kembali; (b) biaya pendidikan ditingkatkan; dan (c) semua a dan b diorientasikan kepada kebutuhan pengembangan ekonomi yang didasarkan pada teknologi tinggi, fleksibilitas, dan mobilitas angkatan kerja.
 6. Tiap-tiap lembaga pendidikan diupayakan agar mampu menghidupi diri sendiri, dengan mencari sumber-sumber dana tambahan sebanyak mungkin, disamping menerima dana dari pemerintah atau yayasan.
 7. Dana pendidikan perlu dikelola secara profesional, pada umumnya direncanakan dengan SP4, pelaksanaannya diawasi secara ketat, dan dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang sah.
 8. Semua penggunaan dana pada setiap kegiatan perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 9. Pengembangan konsep fungsi produksi dalam pendidikan adalah untuk memudahkan menentukan efisiensi pendidikan. Namun sampai saat ini baru fungsi produksi administrator yang bisa dilaksanakan.
 10. Faktor-faktor utama yang diperhatikan dalam menentukan tingkat efisiensi pendidikan adalah (a) penggunaan uang; (b) proses kegiatan; dan (c) hasil kegiatan.

H. KESIMPULAN

Ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan dapat berjalan dengan lancar salah satu faktor pendukungnya adalah ekonomi. Dengan biaya, sekolah dapat memberikan sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga tujuan pemerintah untuk memajukan generasi muda saat ini dapat tercapai. Selain itu, pertumbuhan ekonomi banyak membantu orang-orang kurang mampu untuk bersekolah.

Ekonomi merupakan salah satu bagian dari langkah solutif yang dapat dijadikan alternatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam lembaga pendidikan di Indonesia, yang berkaitan dengan pengembangan lembaga pendidikan, yang meliputi sarana prasarana penunjang pendidikan, maupun pemberdayaan sumber daya

manusia yang ada dalam lembaga tersebut. Masalah yang sering timbul dalam lembaga pendidikan bukan hanya berfokus pada kurangnya sumber dana, tetapi lebih pada bagaimana pola manajemen sumber dana yang ada, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring dari pihak-pihak pemegang kebijakan sebagai bahan evaluasi kebijakan yang telah dilakukan, sehingga sumber daya tersebut bisa efektif, efisien dan optimal untuk menunjang keberlangsungan dan perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri

DAFTAR RUJUKAN

- Anu. 2014. *KPK: Dana Pendidikan tak Dikelola Baik*. *Harian Terbit*, (Online), (<http://www.harianterbit.com/>), diakses 5 Oktober 2015.
- Cahyadi, D. 2014. *Pendidikan di Indonesia Belum Merata*. *Kompas*, (Online), (<http://regional.kompasiana.com/>), diakses 5 Oktober 2015.
- Chasani, I. 2014. *Kepsek SD Negeri Bekasi Diperiksa Inspektorat*. *Tribun*, (Online), (<http://wartakota.tribunnews.com/>), diakses 5 Oktober 2015.
- Sunaryo, A. 2013. *87 Persen sekolah tak transparan kelola dana BOS*. *Merdeka*, (Online), (<http://merdeka.com/>), diakses 5 Oktober 2015.
- Fattah, Nanang. 2002. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kemdikbud. 2014. *Kemdikbud Tingkatkan Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Sekolah melalui ALPEKA*. (Online), (<http://www.kemdikbud.go.id/>), diakses 5 Oktober 2015..
- Lestari, A. H. 2014, *Pemerintah Anggarkan Dana Pendidikan Rp 368 T*. *Okezone*, (Online), (<http://kampus.okezone.com/>), diakses 5 Oktober 2015.
- Ornstein, A. C., Levine, D. U., & Gutek, G. L. 2011. *Foundations of Education*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Pidarta, Made. 2007. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Online), (ria.kemendiknas.go.id/file/dokumen/SNP.pdf), diakses 5 Oktober 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Online), (www.kemendiknas.go.id/file/dokumen/PP4808.pdf), diakses 5 Oktober 2015.
- Wikipedia. Tanpa tahun. *Ekonomi*. (Online), (<http://id.wikipedia.org/>), diakses 5 Oktober 2015.